

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak dimulainya abad ke-21, keterbukaan Tiongkok pada dunia internasional semakin menjurus pada tujuan kebijakan ekonomi politik internasional Tiongkok yang ekspansif dan hegemonik. Perkembangan ekonomi Tiongkok merupakan hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Hal tersebut secara khusus tercermin dari kebutuhan Tiongkok akan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai penanda kebangkitannya. Pada abad ke-20, Tiongkok mengalami berbagai revolusi yang membuat stabilitas ekonomi domestiknya bergejolak, sehingga Tiongkok melalui kepemimpinan sentralistiknya berupaya memodernisasi perekonomiannya dan menghasilkan kebijakan yang pragmatis<sup>1</sup>. Pasca pemerintahan Mao Zedong, Tiongkok mulai tumbuh sebagai kekuatan ekonomi yang terbuka bagi kerjasama internasional, lalu dilanjutkan lagi pada masa setelah kepemimpinan Deng Xiaoping, yang semakin lama semakin longgar, terutama dalam hal merekonstruksi krisis ekonomi yang disebabkan oleh isolasi perdagangan yang terjadi pada masa Mao Zedong (Ayu Putu Eva Wishanti, 2016 : 1-2)

Dikutip dari Pathak (2015), Hu Jintao sebagai Presiden Tiongkok pada saat itu mencanangkan *The Peaceful Rise of China*, yakni kebangkitan Cina yang

---

<sup>1</sup>*KBBI*, Kebijakan yang Pragmatis adalah, kebijakan yang bersifat praktis dan berguna bagi umum; bersifat mengutamakan segi kepraktisan dan kegunaan yang bersangkutan dengan nilai-nilai praktis.

damai. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut salah satu program kerjasama yang di luncurkan Tiongkok adalah Program *One Belt, One Road Initiative* atau biasa disingkat dengan “OBOR”. Tujuan Tiongkok dalam melakukan kebijakan ini, salah satunya untuk membangun kerjasama dengan berbagai negara yang ada di Asia, Afrika dan Eropa dengan membangun berbagai infrastruktur untuk memperlancar jalur perdagangan antar tiga benua tersebut (Dewi & Akbar, 2017 : 1-2).

Peran Tiongkok dalam dunia internasional tentu akan meningkat ketika Tiongkok menerapkan strategi OBOR-nya. Strategi OBOR ini tidak hanya akan membawa investasi dalam jumlah besar baik di dalam negeri maupun di luar negeri. OBOR tidak hanya merubah gaya pemerintahan selama ribuan tahun di Tiongkok, namun juga menimbulkan berbagai gelombang reaksi dari negara-negara tetangganya. Strategi OBOR telah diimplementasikan secara bertahap sejak tahun 2015, garis kebijakan luar negeri Tiongkok yang pada awalnya bersifat *taoguang yanghui* yang artinya “tetap rendah hati dan menunggu waktu yang tepat” harus mengalami perubahan drastis agar menjadi *yousuo zuowei* yang artinya “melakukan sesuatu” dan *fengfayouwei* yang artinya “berjuang untuk pencapaian” hal ini dilakukan Tiongkok agar dapat mengejar orientasi kebijakan baru yang dilakukannya (Xue, 2016 : 24).

OBOR juga erat kaitannya dengan pengembangan pasar baru, peningkatan investasi keluar, penghapusan kelebihan kapasitas, revitalisasi ekonomi regional, promosi diplomasi lingkungan, dan lain-lain. Melalui perdagangan luar negeri dan

peningkatan perdagangan luar investasi, OBOR memiliki peranan penting dalam kemajuan Tiongkok. Keterlibatan Tiongkok dalam tata kelola global melalui strategi OBOR cenderung tidak dapat dihindarkan dan akan diperkuat di masa yang akan datang. Dalam melakukan strategi-strategi yang disusun dalam OBOR Tiongkok memiliki caranya sendiri untuk menjalin kerjasama dengan negara-negara Belt and Road Initiative (BRI) (Ohashi, 2018 : 94-100).

Dalam kebijakan OBOR ini, juga terdapat kepentingan ekonomi Tiongkok dengan melakukan berbagai kerjasama untuk menjalin hubungan negaranya dengan negara lain untuk menjamin akses pasar dan sumber daya guna semakin meningkatkan kekuatan ekonominya. Kepentingan ekonomi suatu negara adalah hal yang diperlukan untuk tetap menjamin keberlangsungan hidup sebuah negara, dan untuk mencapainya dapat dilakukan dengan cara berinteraksi dengan negara lain (Herawati, 2015 : 841).

Walaupun kepentingan ekonomi merupakan kepentingan utama Tiongkok, kepentingan politik juga tetap diperhatikan. Kepentingan politik sebuah negara merupakan ungkapan yang dipusatkan dari semua kepentingan nasional, dengan kedaulatan negara sebagai intinya (Herawati, 2015 : 841). Kebijakan OBOR merupakan sebuah cara Tiongkok untuk mencapai kepentingan ekonomi dan politiknya. Melalui berbagai kerjasama dan investasi yang ada pada kebijakan OBOR ini, Tiongkok akan mampu mempererat hubungannya dengan negara-negara yang terlibat. Luasnya cakupan kebijakan OBOR ini juga akan

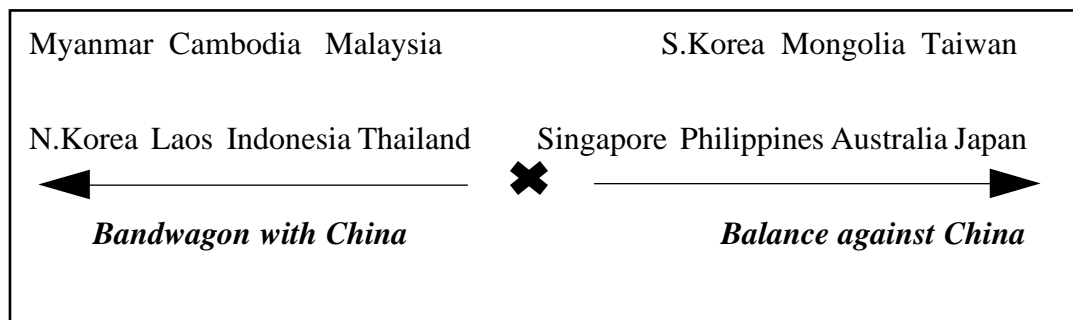
mampu membuat Tiongkok memiliki status internasional nya sebagai negara besar (Dewi & Akbar, 2017 : 4).

Kebijakan luar negeri Tiongkok di abad ke-21 lebih mengemukakan prinsip non konfrontasi namun tetap proaktif. Prinsip tersebut ditujukan untuk mencitrakan Tiongkok yang tidak agresif dan dapat bekerjasama dengan mudah (Jiangyu, 2011 : 557-558).

Saat ini, Tiongkok melihat Asia sebagai saluran strategis untuk merangkul masyarakat internasional, baik secara multilateral, sub-regional, maupun bilateral. Pesatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok menimbulkan respon dari negara-negara tetangga Tiongkok di kawasan Asia Timur, sebagaimana tersirat pada gambar berikut ini:

**Gambar 1.1**

*Spectrum of East Asia's Responses to the Rise of China*



Sumber: Chung, 2014.

Dalam gambar diatas tersirat bahwa kebangkitan Tiongkok memicu respon dari negara-negara lain, khususnya negara- negara di kawasan Asia Timur. Anak panah kiri menunjukkan proporsi bahwa sikap negara-negara yang diterangkan

dalam figur cenderung mengikuti alur kebijakan yang dilakukan Tiongkok. Sedangkan anak panah kanan menunjukkan bahwa sikap negara-negara cenderung ingin menyamaratakan posisinya dengan Tiongkok. Mengacu pada figur di atas bagian anak panah kiri menunjukkan bahwa Korea Utara kurang mengungkapkan kekhawatirannya terhadap Tiongkok, dalam hal ini Korea Utara termasuk dalam katogeri *Bandwagoners*. Selanjutnya, Korea Selatan masuk kedalam kategori *Active hedgers* yang mana berupaya untuk menyeimbangkan antara Washington dan Beijing. Berbeda dengan Korea Utara dan Korea Selatan, Jepang dan Taiwan berusaha untuk membatasi kebangkitan Tiongkok dengan cara bekerjasama, hal ini termasuk dalam katagori *Balancers* (Chung, 2014 : 669).

Dalam penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh (Yuniarto, 2017) beliau menerangkan bahwa Tiongkok memiliki beberapa tujuan dalam membentuk strategi OBOR, ia menjelaskan empat hal yang dilakukan oleh Tiongkok dan berkaitan dengan OBOR mulai dari sejarah OBOR, pengembangan infrastruktur, perdagangan, investasi dan meningkatkan hubungan Tiongkok dengan masyarakat internasional, di dalam penelitiannya beliau juga menjelaskan manfaat OBOR bagi negara-negara di kawasan Asia, Eropa dan negara dunia lainnya. Dalam hal ini (Yuniarto, 2017), lebih menjelaskan bagaimana bahaya yang akan dihadapi oleh negara-negara mitra kerjasama OBOR dalam isu keamanan terorisme dan bencana alam. Dalam penelitiannya pun, beliau lebih menitik beratkan peran OBOR dikawasan Asia Tengah dan Asia Tenggara. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang memiliki fokus di kawasan Asia

Tengah dan Asia Tenggara, penelitian ini lebih spesifik menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Tiongkok melalui strategi OBOR dan dampak dari strategi OBOR itu sendiri di kawasan Asia Timur.

Dalam penelitian lainnya (Rahman, 2005) mengatakan bahwa kebangkitan ekonomi Tiongkok dipersepsikan sebagai sebuah bentuk ancaman oleh pemerintah dan masyarakat Jepang. Persepsi ancaman tersebut tidak lepas dari beberapa kebijakan ekonomi luar negeri Tiongkok yang bertujuan untuk meningkatkan peranan dan pengaruh Tiongkok di kawasan, khususnya Asia Timur dan Tenggara dalam pertumbuhan ekonomi. Penelitian sebelumnya juga menggunakan konsep hegemoni.

Namun berbeda dari penelitian sebelumnya yang menjelaskan respon Jepang terhadap Tiongkok, penelitian ini akan menjelaskan respon dan pengaruh di cakupan yang lebih besar, dalam hal ini cakupannya tidak hanya satu negara tetapi dalam lingkup kawasan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis potensi Tiongkok untuk menjadi negara hegemon melalui strategi OBOR dan mengetahui dampak dari strategi OBOR di kawasan Asia Timur.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan berupaya menjawab pertanyaan:

Apakah Tiongkok memungkinkan untuk menjadi negara hegemon di Asia Timur?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yang dijelaskan sebagai berikut.

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi Tiongkok untuk menjadi negara hegemon di kawasan Asia Timur melalui skema OBOR dan juga mengetahui dampak strategi OBOR terhadap negara kawasan Asia Timur.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah menjelaskan, menganalisis dan mengetahui upaya yang dilakukan oleh Tiongkok untuk menjadi negara hegemon dan dampak dari strategi OBOR yang dilakukan oleh Tiongkok di kawasan Asia Timur.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangsih terkait pemikiran akademis dalam menganalisis suatu fenomena kebangkitan Tiongkok dan upaya Tiongkok untuk menjadi negara hegemon di kawasan Asia Timur melalui strategi OBOR dengan menggunakan teori Realisme Ofensif dan Konsep Hegemoni di dalam Ilmu Hubungan Internasional.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan gambaran dan analisis bagaimana upaya hegemoni yang dilakukan oleh Tiongkok melalui strategi OBOR dan bagaimana dampak dari strategi OBOR bagi negara kawasan Asia Timur.

#### **1.5 Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini menjelaskan bagaimana teori realisme ofensif dan konsep hegemoni menjelaskan upaya Tiongkok untuk menjadi negara hegemon di kawasan Asia Timur, melalui teori dan konsep yang dijelaskan nantinya penulis akan mengkaitkan strategi OBOR yang dilakukan oleh Tiongkok dengan teori dan konsep tersebut sehingga akan terlihat bahwa Tiongkok berusaha untuk menjadi negara hegemon di kawasan Asia Timur. Dengan demikian maka, teori realisme ofensif dan konsep hegemoni akan menjawab rumusan masalah yang ada.

##### **1.5.1 Teori Realisme Ofensif**

Terdapat dua bagian dari neo-realisme, yakni realisme defensif dan realisme ofensif. Realisme defensif mengatakan bahwa merupakan hal bodoh untuk mengejar hegemoni, realisme defensif beranggapan bahwa negara seharusnya tidak berusaha untuk memaksimalkan kekuasaan melainkan cukup untuk mempertahankan apa yang sudah dimilikinya. Realis defensif menekankan bahwa jika ada negara yang menjadi terlalu kuat, keseimbangan kekuatan akan terjadi. Khususnya di kalangan kekuatan besar yang akan membangun militer mereka dan membentuk koalisi penyeimbang yang akan membuat calon hegemon menjadi kurang aman. Realisme defensif juga mengatakan bahwa ada



keseimbangan serangan pada pertahanan yang akan menunjukkan betapa mudah atau sulitnya menaklukkan sebuah wilayah, namun menurut realisme defensif sulit bagi sebuah negara untuk mengeksploitasi negara lain baik dalam hal ekonomi maupun teknologi, dikarenakan telah terjadinya keterbukaan dan kebebasan. Sebagaimana yang dicatat realisme defensif bahwa mengancam keseimbangan sebuah negara dengan cara menyerang pada akhirnya akan menghancurkan mereka sendiri oleh karena hal itu, kekuatan besar harus puas dengan keseimbangan kekuatan yang sudah ada dan tidak berusaha untuk mengubahnya dengan paksa. Berbanding terbalik dengan hal tersebut, realisme ofensif berpandangan bahwa, tujuan negara bukan untuk mempertahankan status quo melainkan untuk menjadi yang terkuat dalam sebuah sistem internasional, selanjutnya penelitian ini akan menggunakan persektif realisme ofensif dalam menganalisis masalah yang terjadi (Mearsheimer, 2001)

Dalam teori realisme ofensif ini, Mearsheimer mengatakan bahwa bahwa tujuan utama negara adalah menjadi yang terkuat. Teori realisme ofensif menekankan efek dari struktur internasional yang anarki sehingga negara berusaha untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan berhubungan dengan negara-negara lain untuk mencapai posisi keamanan yang lebih besar (Zhang, 2016).

Seperti yang telah disebutkan di atas teori realisme ofensif memandang bahwa sistem internasional adalah anarki, yang berarti dunia ditandai oleh persaingan keamanan dan perang. Realisme ofensif memiliki prinsip bahwa tidak

ada kedaulatan yang lebih tinggi dari pada kedaulatan suatu negara, dengan kata lain tidak ada pemerintah diatas pemerintah. Realisme ofensif juga mengatakan negara tidak pernah bisa memastikan tentang niat negara lain. Secara khusus, tidak ada negara yang dapat memastikan bahwa negara lain tidak akan menggunakan kemampuan militer ofensifnya untuk menyerang negara lainnya. Mearsheimer (2001), mengatakan bahwa bertahan hidup adalah tujuan utama sebuah negara. secara khusus negara akan berusaha mempertahankan integritas teritorial dan otonomi tatanan politik domestik mereka, salah satu cara untuk bertahan hidup didefinisikan dengan cara menghegemoni, ketika sebuah negara sudah menjadi hegemon maka dapat dipastikan tidak akan ada kekuatan lain yang dapat mengganggu keamanan negara.

Negara dalam sistem internasional harus menjamin kelangsungan hidup negaranya. Setiap negara cenderung melihat dirinya rentan dan sendirian, oleh karena itu negara bertujuan untuk mengusahakan kelangsungan hidupnya sendiri. Negara cenderung membentuk aliansi untuk bekerjasama, tetapi hal tersebut tidak akan berlangsung lama, Realisme ofensif memandang bahwa, mitra aliansi hari ini mungkin akan menjadi musuh masa depan, dan musuh hari ini adalah mitra aliansi masa depan, seperti apa yang dikatakan oleh Lord Palmerstone “ *Nations Have No Permanent Friends or Allies, They Only Have Permanent Interest*”.

Realisme ofensif juga menyatakan bahwa aktor dari sistem internasional akan saling curiga satu sama lain yang dengan tujuan untuk memastikan mereka sendiri tetap bertahan hidup. Negara berusaha untuk meningkatkan kekuatan

relatif mereka yang pada akhirnya menimbulkan ketakutan terhadap negara lain. Mearsheimer menyatakan bahwa ada peluang bagi seorang aktor untuk mengejar lebih banyak kekuatan, namun dalam upaya mendapatkannya tak jarang dengan mengorbankan pihak lain. Seperti yang dicatat Mearsheimer, ada kemungkinan negara akan melakukan kerjasama antar satu sama lain dalam situasi tertentu, tetapi pada akhirnya dalam kerjasama tersebut, konflik kepentingan akan terjadi yang mengarah pada kompetisi. (Dirzauskaite & Cristinel Ilinica, 2017)

Oleh karena hal tersebut negara akan terus berusaha untuk menjadi *Great Power*. *Great Power* dalam Mearsheimer (2001) diartikan sebagai negara yang memiliki keunggulan dalam beberapa aspek yang menyebabkan *Great Power* memiliki potensi untuk mendominasi aspek yang ia kuasai. *Great Power* akan selalu merasa curiga dan takut jika akan ada serangan yang terjadi padanya. Dari salah satu perspektif *Great Power*, *Great Power* lainnya akan berpotensi menjadi musuh. *Great Power* pada dasarnya memiliki kemampuan untuk menghancurkan satu sama lain dan tentu memiliki tujuan dalam melakukan hal tersebut. karena itu *Great Powers* adalah revisionis yang bertujuan untuk menjadi negara yang paling kuat dalam sistem internasional.

Dalam pandangan Mearsheimer, ia mengatakan bahwa terdapat dua jenis hegemon dalam sistem internasional. Pertama, mengenai *Global Hegemon* yang mana Mearsheimer meyakini bahwa keberadaan *Global Hegemon* hampir tidak mungkin kecuali terdapat sebuah negara yang telah memperoleh keunggulan nuklir yang jelas dan keunggulan tersebut didefinisikan sebagai kemampuan

untuk menghancurkan saingannya tanpa takut akan pembalasan. Kehadiran *Global Hegemon* dapat ditandai setelah berakhirnya perang dingin dimana ketika runtuhnya Uni Soviet, Amerika merupakan satu-satunya kekuatan besar di dunia, dan para realis mempercayai bahwa telah terjadi sistem unipolar dalam dunia internasional, hal ini menyebabkan Amerika secara terang-terangan menunjukkan bahwa ia telah berhasil mencapai hegemoni dunia. Ketika Amerika menjadi hegemon pada saat itu, tidak ada negara di kawasannya yang berupaya untuk memulai perang dengan Amerika. Dan tertanya ketakutan ini juga telah tersebar di berbagai belahan dunia yang pada saat itu menganggap bahwa Amerika merupakan *Global Hegemon*. *Global Hegemon* sendiri dapat diartikan sebagai negara dengan kekuatan besar yang merasa aman dengan kekuatan yang ia miliki dan berupaya untuk menyusun ulang politik daerah yang jauh melalui kekuatan militer yang ia miliki. Negara yang menjadi *Global Hegemon* akan bergerak dalam sebuah rekayasa sosial berskala besar dan *Global Hegemon* ini hanya terdapat dalam sistem Unipolar (Mearsheimer, 2007 : 86).

Mearsheimer juga meyakini bahwa hegemoni hanya dapat bersifat regional atau dalam buku Mearsheimer yang berjudul "*International Relations Theory: Dicipline and Diversity*" ia menyebutkan *Regional Hegemon* dengan sebutan *Potential Hegemon/Preponderant Power*. Mearsheimer menjelaskan *Regional Hegemon* sebagai negara yang paling kuat dalam sistem regional dan memiliki sarana untuk menjalankan dominasi pada sistemnya yang merupakan jaminan terbaik untuk tetap bertahan hidup dalam anarki internasional. Karena hal

tersebut negara tidak akan puas dengan *status quo* sehingga mencari peluang untuk mendapatkan hegemoni. *Regional Hegemon* juga memiliki peluang untuk mendominasi wilayahnya dengan mengatasi kemampuan tetangga-tetangganya yang besar hal ini tentunya memandang ukuran ekonomi dan militer untuk saling bersaing (Mearsheimer, 2007).

Realisme Ofensif disatu sisi memang lebih cenderung membicarakan mengenai kekuatan militer sebuah negara untuk menjadi yang terkuat, namun upaya yang dilakukan untuk menambah kekuatan militer sebuah negara memerlukan bantuan dan ekonomi yang mendukung, hal ini seperti yang terdapat dalam buku yang berjudul "*The Rise and Fall of the Great Powers*" oleh Kennedy (1988), ia menjelaskan mengenai keterkaitan antara ekonomi dan militer, Kennedy mengatakan bahwa antara ekonomi dan militer terdapat hubungan saling mempengaruhi. Ekonomi dan militer merupakan dua variabel kunci untuk memahami jatuh banggunya negara-negara besar. Menurut Kennedy, faktor-faktor ekonomi dapat mendorong negara mengalami kebangkitan, tetapi sebaliknya hal tersebut juga dapat menyebabkan negara mengalami kemunduran hingga akhirnya runtuh dari peradaban dunia. Dalam buku yang ditulis oleh Kennedy terdapat *underlying factor* yang mana mengatakan bahwa faktor ekonomi akan menentukan kekuatan militer suatu negara, dan berbandingan dengan hal tersebut militer yang kuat pada gilirannya diperlukan untuk perekonomian suatu negara. Hal ini menyebabkan kekuatan militer juga penting karena menentukan apakah negara tersebut menduduki posisi sebagai kekuatan

dunia atau bukan. Menurut Kennedy dalam memahami politik internasional jauh lebih penting untuk memfokuskan pada aspek-aspek material serta meyakini bahwa kekuasaan senantiasa bersifat relatif dengan mengukur perbandingan kekuasaan dengan negara-negara lain dari pada berlandaskan pada praktik-praktik diplomasi (Rosyidin, 2018 : 134-135).

### **1.5.3 Konsep Hegemoni**

Istilah hegemoni sendiri dalam hubungan internasional diperkenalkan oleh Robert Keohane yang berasal dari bahasa Yunani yakni dari kata *Hegemonia* yang berarti dominasi atau kepemimpinan. Hegemon dipahami sebagai aktor yang memegang kekuasaan paling besar. Namun, ada dua jenis kekuatan untuk membedakan antara hegemoni langsung dan tidak langsung. Menurut Stiles (2009), “Hegemoni merupakan dominasi satu negara atas negara rekan-rekannya”, menurut (Ikenberry & Kupchan, 1990), “Hegemoni adalah ketika adanya dominasi dalam kemampuan militer dan ekonomi”. kekuatan hegemonik dikonseptualisasikan sebagai aktor yang cukup kuat untuk menetapkan aturan internasional. Hegemoni tergantung pada dua faktor, faktor kemampuan aktor untuk memiliki kekuatan yang cukup dan kemauan untuk melatih kemampuannya.

Dalam hegemoni ada dua jenis kekuatan yakni kekuatan langsung dan tidak langsung. Kekuatan langsung diartikan sebagai usaha negara hegemon dengan cara menyajikan aspek dari kemampuan hegemon untuk memengaruhi

aktor agar mencapai hasil yang diinginkan hegemon. Kekuatan hegemon langsung mengacu pada penggunaan militer untuk menempatkan kekuatan koersif atau menggunakan sumber daya ekonomi untuk mendapatkan dan memperkaya senjata militernya. Kekuatan tidak langsung tidak dapat diukur karena ia berbentuk seperti kemampuan untuk menarik aktor dengan menggunakan ide-ide hegemon yang disajikan dan bahkan dapat mengubah ide-ide menjadi preferensi semua orang. Kekuatan tidak langsung ini dapat diartikan dengan adanya usaha-usaha dan kerjasama yang di tawarkan oleh negara hegemon untuk menarik negara lain. Ada tiga kesamaan dalam mengkonseptualisasikan perbedaan definisi hegemoni, kesamaan ini digunakan sebagai fitur utama dalam hegemoni. Pertama, hegemon harus memiliki kekuatan relatif yang substansial ketika di gabungkan dengan aktor yang lain. Kedua, hegemon harus dapat membuat aturan atau kebijakan luar negeri dalam politik internasional dan bersedia untuk melakukan hal tersebut dan harus mampu atau cenderung mengambil peran dalam kepemimpinan internasional. Ketiga, kepemimpinan nya harus diakui oleh kekuatan utama.

Pada dasarnya konsep hegemoni adalah bagian dari teori realis, dalam teori realis, kekuasaan adalah “mata uang politik internasional” (Mearsheimer J.J., 2010 : 78) dan oleh karena itu, strategi dan tindakan negara harus selalu memperhatikan kekuatan di dalam dunia internasional. Menurut Meirsheimer, entah itu berusaha untuk meningkatkan kekuatan relatif di ranah internasional atau untuk memastikan tidak ada aktor kuat lainnya yang muncul dan menantang

tatanan dunia, negara akan saling melihat kekuatan ekonomi dan militer secara relatif untuk saling bersaing.

Seperti yang telah dikemukakan oleh Mearsheimer dalam teori realisme ofensif, sistem internasional akan memberikan dorongan pada negara agar berupaya untuk meningkatkan kekuatan dan mendapatkan lebih banyak kekuasaan karena tujuan utama negara adalah menjadi satu-satunya kekuatan utama dalam sistem atau menjadi hegemon (Mearsheimer, 2001).

Setelah diuraikan semua kerangka pemikiran yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya, maka akan didapatkan alur berpikir. Pada tahap pertama, peneliti akan menjelaskan kondisi Tiongkok pada awal abad ke-21 dan menjelaskan perkembangan Tiongkok secara singkat setelah masa kepemimpinan Hu Jintao. Hal tersebut selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan untuk menjelaskan kepentingan Tiongkok yakni salah satunya mengenai strategi One Belt One Road (OBOR) dan beberapa kepentingan Tiongkok lainnya. Setelah beberapa hal tersebut dijelaskan, maka akan dijelaskan pula respon dari negara kawasan Asia Timur terhadap kondisi Tiongkok saat ini. Lalu kesimpulan akhir dari penelitian ini akan menjelaskan strategi One Belt One Road sebagai upaya pembentukan hegemon Tiongkok di kawasan Asia Timur. Untuk menyederhanakannya, akan dijelaskan melalui bagan alur berfikir yang tertera setelah paragraf ini. Hal ini digunakan dalam rangka memudahkan peneliti untuk menjawab rumusan masalah dan memudahkan pembaca dalam rangka memahami isi dari penelitian yang dilakukan.



## Bagan 1.1

### Alur Pemikiran dalam Analisis Rumusan Masalah



Sumber: Diolah oleh peneliti

### 1.6 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dituliskan sebelumnya, penulis berpendapat bahwa strategi OBOR yang dilakukan oleh Tiongkok merupakan upaya Tiongkok untuk menjadi negara hegemon di kawasan Asia Timur. Dalam proses menjadi negara hegemon Tiongkok menggunakan dua kekuatan yang ada dalam konsep hegemoni, yakni kekuatan langsung dan kekuatan tidak langsung. Kekuatan ini berkaitan dengan peningkatan dalam bidang ekonomi dan militer yang dilakukan melalui skema OBOR yang menjadi kedok agar Tiongkok dapat menjadi negara hegemon di kawasan Asia Timur.

## **1.7 Metodologi Penelitian**

### **1.7.1 Definisi Konseptual**

#### **1.7.1.1 *Great Power***

Dalam penelitian ini definisi konseptual dari *Great Power* diartikan sebagai negara yang memiliki keunggulan dalam beberapa aspek yang menyebabkan negara tersebut memiliki potensi untuk mendominasi aspek yang ia kuasai. *Great Power* pada dasarnya memiliki kemampuan untuk menghancurkan satu sma lain dan tentu memiliki tujuan dalam melakukan hal tersebut.

#### **1.7.1.2 Hegemoni**

Hegemoni dipahami sebagai aktor yang memegang kekuasaan paling besar. Hegemoni dapat dilihat ketika adanya dominasi dalam kemampuan di bidang ekonomi dan militer, terdapat dua jenis kekuatan dalam konsep hegemoni:

##### **1. Kekuatan Langsung**

Kekuatan langsung diartikan sebagai usaha negara hegemon dengan menyajikan aspek dari kemampuan negara hegemon tersebut untuk memengaruhi aktor agar mencapai hasil yang diinginkan oleh negara hegemon

##### **2. Kekuatan Tidak Langsung**

Kekuatan tidak langsung diartikan sebagai kemampuan untuk menarik aktor dengan menggunakan ide-ide yang disajikan oleh negara hegemon dan pada akhirnya dapat mengubah ide-ide tersebut menjadi preferensi semua orang.

## **1.7.2 Definisi Operasional**

### **1.7.2.1 *Great Power***

Definisi operasional *Great Power* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

- a) Bentuk tindakan: *Great Power* cenderung mendominasi beberapa aspek dalam sistem internasional dan memiliki potensi untuk mendominasi aspek yang ia kuasai.
- b) Tujuan: Tujuan dari *Great Power* sendiri adalah menjadi negara yang paling kuat dalam sistem internasional.

### **1.7.2.2 Hegemoni**

Dalam mewujudkan negara sebagai hegemon, konsep hegemoni menggunakan kekuatan langsung dan tidak langsung untuk menjelaskan aspek-aspek yang saling berhubungan:

#### **1. Kekuatan Langsung**

Untuk menganalisis kekuatan langsung dalam penelitian ini menggunakan indikator:

- a) Bentuk tindakan: kekuatan hegemon langsung mengacu pada penggunaan dan peningkatan pada bidang militer dan ekonomi yang dapat ditandai dengan meningkatnya anggaran belanja militer Tiongkok dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Dalam hal ini, penggunaan militer sebagai alat untuk menempatkan kekuatan koersif dan sumber daya ekonomi sebagai alat untuk mendapatkan dan memperkaya senjata militernya.

b) Proses: dalam penggunaan kekuatan langsung negara hegemon akan cenderung memengaruhi aktor lain agar mencapai hasil yang diinginkan hegemon.

## 2. Kekuatan Tidak Langsung

Untuk menganalisis kekuatan tidak langsung dalam penelitian ini menggunakan indikator:

a) Bentuk tindakan: adanya usaha-usaha dan kerjasama yang ditawarkan oleh negara hegemon untuk menarik negara lain.

b) Proses: dalam menggunakan kekuatan tidak langsung negara hegemon menggunakan ide-ide yang disajikan sedemikian rupa sehingga mampu mempengaruhi tindakan dan keputusan negara lain.

### 1.7.3 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan tipe deskriptif analitis yaitu penelitian dengan metode ilmiah yang melibatkan, mengamati dan menggambarkan perilaku subjek tanpa mempengaruhinya dengan cara apapun (Shuttleworth, 2008).

Penelitian ini menambahkan analisis dengan alat teori atau kerangka pemikiran dari hasil mengamati peristiwa yang terjadi. Tujuan penelitian deskriptif analitis adalah untuk memberikan gambaran dan analisis mengenai upaya hegemoni yang dilakukan oleh Tiongkok melalui strategi OBOR di kawasan Asia Timur dan dampak dari strategi OBOR terhadap negara-negara di kawasan Asia Timur.

#### **1.7.4 Jangkauan Penelitian**

Penelitian ini akan menganalisis masalah sejak di mulai nya diskusi mengenai OBOR di Beijing pada tahun 2015 hingga tahun 2018.

#### **1.7.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis melalui data sekunder, yakni melalui buku, jurnal, hasil berita, maupun situs-situs internet yang relevan dan akredibel. Kemudian peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis data tersebut untuk menemukan jawaban yang pasti atas rumusan masalah penelitian ini.

#### **1.8 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab. Bab 1 adalah pendahuluan yang merupakan kerangka riset atau penelitian. Bab 2 berisi data dan menjelaskan mengenai keberadaan Tiongkok di Kawasan Asia Timur dan sejarah strategi One Belt One Road (OBOR), serta respon negara-negara Asia Timur terhadap strategi *One Belt One Road*.

Bab 3 akan berisi analisis mengenai perkembangan geopolitik dan geoekonomi Tiongkok untuk menjadi negara hegemon di Kawasan Asia Timur melalui strategi One Belt One Road

Bab 4 adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran terhadap penelitian lebih lanjut.